

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh :
HAFY BAGASWARA
B 200 120 136**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh

HAFY BAGASWARA

B 200 120 136

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Drs. Eko Sugiyanto, M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Yang ditulis oleh:

HAFY BAGASWARA

B200120136

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Kamis 22 Agustus 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Dewan Penguji:

1. **Drs. Eko Sugiyanto, M.Si**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Drs. Suyatmin W.A., M.Si**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Fauzan, S.E, M.Si**
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Syamsudin, S.E., MM)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 Agustus 2019

Penulis



HAFY BAGASWARA
B200120136

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KETERANDALAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali)**

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi atau penatausahaan keuangan pada 19 SKPD di Kabupaten Boyolali. Pengambilan sampel responden dilakukan secara *convenience* sampling (sampel kemudahan). Dalam penelitian ini untuk menganalisis data dilakukan uji Asumsi Klasik, uji F, uji t, uji Regresi Linear Berganda dan Koefisien Determinasi (R^2). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa: (1) Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah; (2) Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah; (3) Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan daerah.

Kata Kunci: kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the influence of human resources, the use of information technology and regional financial supervision on the reliability of financial reporting in the local government of Boyolali Regency. This research uses descriptive analysis method. The population in this study is the accounting or financial administration section of 19 SKPD in Boyolali Regency. The sampling of respondents was done by convenience sampling (convenience sample). In this study to analyze the data carried out Classical Assumption test, F test, t test, Multiple Linear Regression test and Coefficient of Determination (R^2). The results of hypothesis testing indicate that: (1) Capacity of human resources influences the reliability of regional financial reporting; (2) The use of information technology does not affect the sustainability of regional financial reporting; (3) Regional Financial Supervision affects the Regional Financial Reporting Reliability.

Keywords: human resource capacity, utilization of information technology, regional financial supervision.

1. PENDAHULUAN

Berlakukannya otonomi daerah, mengakibatkan daerah memiliki hak, wewenang dan kewajibannya dalam mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan ini, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut tentu disertai dengan penyerahan dan pengalihan

pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang terkait dalam kerangka desentralisasi fiskal. Akibat dari pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut tentu adalah kebutuhan akan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur pengelolaan keuangan daerah serta pertanggungjawabannya menyebutkan pertanggungjawaban tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawabannya, yang tentunya harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan pemerintah daerah bisa saja dijadikan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, informasi dalam laporan keuangan sesungguhnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi keuangan dari semua kalangan ataupun dalam hal ini kelompok pengguna seperti investor, masyarakat, dan juga pemerintah. Dengan ini berarti, laporan keuangan pemerintah daerah tentunya tidak dirancang untuk hanya memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Walaupun demikian, laporan keuangan pemerintah daerah dalam perannya sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, komponen laporan yang diinformasikan paling tidak mencakup jenis laporan atau elemen informasi yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Terdapat karakteristik laporan keuangan yang merupakan syarat yang diperlukan agar dapat memenuhi kualitas yang sesuai dengan ditentukan (PP No 71 Tahun 2010) yaitu: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Dalam PP No 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa keterandalan laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut.

Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan keterandalan dari laporan keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas yang ditentukan perundang-undangan. Selain itu juga laporan keuangan daerah yang andal akan dapat dipercaya oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam Priymana dkk (2014).

Sistem informasi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sistem informasi akan mampu dijalankan optimal apabila terdapat sumber daya manusia yang mumpuni sebagai penggerak dari sistem informasi yang ada. Untuk mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas melalui informasi tersebut, diperlukan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas juga agar mampu menjalankan sistem tersebut dengan baik. Amran (2009) dalam Mahaputra dan Putra (2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu lembaga atau organisasi. Dengan dimilikinya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya mampu meningkatkan kualitas informasi pada pelaporan keuangan dalam Mahaputra dan Putra (2014).

Selain sumber daya manusia, hal yang memengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 65 Tahun 2010, SIKD memberi manfaat atau kemudahan dalam mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Hal tersebut selaras dengan penelitian Fikri Miftahul (2011) dalam Mahaputra dan Putra (2014) yang memperoleh hasil Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian pemanfaatan SIKD dalam proses penyusunan laporan keuangan akan mampu meningkatkan kualitas informasi pada laporan keuangan dalam Mahaputra dan Putra (2014).

Hal terakhir yang memiliki pengaruh terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai

dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007) dalam Arfianti (2011). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011.

Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus dilakukan secara terus-menerus (*series of actions and on going basis*). Disamping itu, diperlukan perubahan pola pikir (*mind set*) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (*early warning*) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam Arfianti (2011).

2. METODE

Metode yang digunakan analisis deskriptif. Jenis penelitian kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan metode kusioner pada karyawan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali pada tahun 2017. Populasinya adalah bagian akuntansi/ penatausahaan keuangan pada 19 SKPD di Kabupaten Boyolali. Pengambilan sampel responden dilakukan secara *convenience* sampling (sampel kemudahan). Variable yang digunakan adalah variabel dependen yaitu keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali dan Variabel independen yaitu Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan. Metode analisis data dengan uji reabilitas, uji validitas, uji asumsi klasik meliputi multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Uji kebaikan model meliputi koefisien regresi simultan (uji statistik-F), koefisien determinasi (*R square*), pengujian koefisien regresi parsial (uji statistik-t).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini didesain untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Boyolali. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Tabel 1. Proses Pengambilan Sampel

NO	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah SKPD Kabupaten Boyolali.	24
2	Jumlah SKPD Kabupaten Boyolali yang tidak berkenan menjadi responden	(5)
3	Jumlah SKPD Kabupaten Boyolali yang berkenan menjadi responden penelitian.	19
4	Jumlah seluruh pegawai SKPD Kabupaten Boyolali yang berkenan menjadi responden penelitian (9X19)	171
5	Jumlah pegawai SKPD Kabupaten Boyolali yang bukan bagian staf keuangan atau akuntansi.	(98)
6	Jumlah pegawai SKPD Kabupaten Boyolali bagian staf keuangan dan akuntansi.	73
7	Jumlah responden	73
8	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	(3)
9	Jumlah sampel	70

Sumber: Data diolah penulis, 2017.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
20-30	9	12,9%
31-40	24	51,9%
41-50	17	24,3%
>50 tahun	20	28,6%
Jumlah	70	100%

Sumber : Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki usia yang berkisar antara 31-40 tahun yaitu sebanyak 24 orang atau sekitar 51,9%. Usia ini menunjukkan usia yang produktif bagi pegawai dalam bekerja.

Tabel 3. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin

Gender	Jumlah	Presentase
Laki-Laki	36	51,4%
Perempuan	34	48,6%
Jumlah	70	100%

Sumber : Data diolah 2017.

Berdasarkan tabel 3 tersebut di atas diketahui bahwa karyawan SKPD Kabupaten Boyolali didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 36 orang atau 51,4%. Hasil ini menunjukkan bahwa, laki-laki lebih memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan.

Tabel 4. Karakteristik Responden Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Presentase
SMA	2	2,9%
D III	3	4,3%
Strata 1	62	88,6%
Strata 2	3	4,3%
Jumlah	70	100%

Sumber : Data diolah 2017.

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikan terakhir S1, yaitu sebanyak 62 orang atau 88,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa, pendidikan yang dimiliki oleh pegawai SKPD Kabupaten Boyolali, sudah tergolong cukup tinggi untuk digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Tabel 5. Karakteristik Responden Menurut Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah	Presentase
<5 tahun	7	10%
5-10 tahun	14	20%
>10 tahun	49	70%
Jumlah	70	100%

Sumber : Data diolah 2017

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah bekerja selama lebih dari 10 tahun, yaitu sebanyak 49 orang atau 70%. Hasil ini menunjukkan bahwa, responden telah memiliki pengalaman serta tingkat pemahaman yang tinggi dalam masalah penyusunan laporan keuangan daerah.

3.2 Hasil Analisis

Tabel 6. Statistik Deskriptif

	N	Min	Maks	Mean	Std. Deviation
Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah	70	30	49	40.46	3.278
Kapasitas SDM	70	23	40	32.44	2.842
Pemanfaatan Teknologi Informasi	70	23	35	29.60	2.667
Pengawasan Keuangan Daerah	70	21	33	28.66	1.903

Sumber: Data diolah, 2017

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa variabel keterandalan pelaporan keuangan daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 40,46, nilai maksimum sebesar 49, nilai

minimum sebesar 30 dan nilai standar deviasi sebesar 3,278. Hasil ini mengindikasikan bahwa, pelaporan keuangan daerah dalam kategori bagus. Variabel kapasitas sumber daya manusia memiliki nilai rata-rata sebesar 32,44, nilai maksimum sebesar 40, nilai minimum sebesar 23 dan nilai standar deviasi sebesar 2,842. Hasil ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan daerah sudah dikatakan mumpuni. Variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai rata-rata sebesar 29,60, nilai maksimum sebesar 35, nilai minimum sebesar 23 dan nilai standar deviasi sebesar 2,667. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, teknologi yang digunakan di SKPD Kabupaten Boyolali, yang mendukung dalam penyusunan laporan keuangan daerah tergolong bagus. Variabel pengawasan keuangan daerah memiliki nilai rata-rata sebesar 28,66, nilai maksimum sebesar 33, nilai minimum sebesar 21, dan nilai standar deviasi sebesar 1,903. Hasil ini menunjukkan bahwa, pengawasan yang diberikan dalam penyusunan laporan keuangan daerah cukup baik.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Variabel Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah

Item	r_{xy}	r_{tabel}	Keterangan
KPK1	0,624	0,235	Valid
KPK2	0,532	0,235	Valid
KPK3	0,708	0,235	Valid
KPK4	0,690	0,235	Valid
KPK5	0,712	0,235	Valid
KPK6	0,427	0,235	Valid
KPK7	0,644	0,235	Valid

Sumber : Data diolah 2017

Nilai r_{tabel} untuk sampel 70 dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 0,235. Tabel 7 menunjukkan bahwa semua butir pernyataan keterandalan pelaporan keuangan daerah adalah valid, karena nilai r_{xy} lebih besar dari r tabel.

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia

Item	r_{xy}	r_{tabel}	Keterangan
KSDM1	0,727	0,235	Valid
KSDM2	0,570	0,235	Valid
KSDM3	0,518	0,235	Valid
KSDM4	0,522	0,235	Valid
KSDM5	0,625	0,235	Valid
KSDM6	0,472	0,235	Valid
KSDM7	0,620	0,235	Valid
KSDM8	0,541	0,235	Valid
KSDM9	0,625	0,235	Valid
KSDM10	0,638	0,235	Valid

Sumber : Data diolah 2017

Nilai r_{tabel} untuk sampel 70 dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 0,235. Tabel 8 menunjukkan semua butir pernyataan tentang kapasitas sumber daya manusia adalah valid, karena nilai r_{xy} lebih besar dari nilai r tabel.

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Item	R_{xy}	r_{tabel}	Keterangan
PTI1	0,510	0,235	Valid
PTI2	0,650	0,235	Valid
PTI3	0,634	0,235	Valid
PTI4	0,549	0,235	Valid
PTI5	0,572	0,235	Valid
PTI6	0,542	0,235	Valid
PTI7	0,586	0,235	Valid
PTI8	0,757	0,235	Valid

Sumber : Data diolah 2017

Nilai r_{tabel} untuk sampel 70 dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 0,235. Tabel 9 menunjukkan semua butir pernyataan tentang pemanfaatan teknologi informasi valid, karena nilai r_{xy} lebih besar dari nilai r tabel.

Tabel 10. Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan Keuangan Daerah

Item	R_{xy}	r_{tabel}	Keterangan
PKD1	0,742	0,235	Valid
PKD2	0,640	0,235	Valid
PKD3	0,875	0,235	Valid
PKD4	0,806	0,235	Valid
PKD5	0,782	0,235	Valid
PKD6	0,673	0,235	Valid
PKD7	0,782	0,235	Valid

Sumber : Data diolah 2017

Nilai r_{tabel} untuk sampel 70 dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 0,235. Tabel 10 menunjukkan semua butir pernyataan tentang pengawasan keuangan daerah adalah valid, karena nilai r_{xy} lebih besar dari nilai r tabel.

Tabel 11. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Keterandalan pelaporan keuangan daerah	0,717	Reliabel
Kapasitas sumber daya manusia	0,757	Reliabel
Pemanfaatan teknologi informasi	0,731	Reliabel
Pengawasan Keuangan daerah	0,871	Reliabel

Sumber : Data diolah 2017

Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel dengan *Cronbach's Alpha* sebagaimana terlihat pada tabel 11 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua instrumen penelitian ini adalah reliabel.

Tabel 12. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov – Smirnov	p-value	Keterangan
<i>Unstandardized Residual</i>	1,236	0,094	Data terdistribusi Normal

Sumber : Data diolah 2017

Dari hasil pengujian *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi untuk model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model persamaan regresi dalam penelitian ini memiliki distribusi data yang normal.

Tabel 13. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kapasitas sumber daya manusia	0,730	1,369	Bebas Multikolinearitas
Pemanfaatan teknologi informasi	0,521	1,920	Bebas Multikolinearitas
Pengawasan Keuangan daerah	0,648	1,544	Bebas Multikolinearitas

Sumber : Data diolah 2017

Berdasarkan tabel 13 menunjukkan bahwa masing-masing nilai VIF berada < 10, demikian juga hasil nilai *tolerance* > 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 14. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	p-value	Keterangan
Kapasitas sumber daya manusia	0,176	Bebas Heteroskedastisitas
Pemanfaatan teknologi informasi	0,136	Bebas Heteroskedastisitas
Pengawasan Keuangan daerah	0,962	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah 2017

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel 14 tersebut terlihat bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai *p-value* lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Tabel 15. Hasil Analisis Koefisien Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	t _{hitung}	Sig
Konstanta	9,499	4,709	0,000
Kapasitas sumber daya manusia	0,099	2,015	0,048
Pemanfaatan teknologi informasi	-0,043	-0,646	0,520
Pengawasan Keuangan daerah	0,560	8,777	0,000
R ² = 0,658 F _{hitung} = 42,369			
Adjusted R ² = 0,643 Sig = 0,000			

Sumber : Data diolah 2017

Untuk menginterpretasi hasil dari analisis tersebut: (1) Konstanta sebesar 9,499 menunjukkan bahwa apabila kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah diasumsikan konstan atau sama dengan nol, maka keterandalan pelaporan keuangan daerah tetap meningkat. (2) Koefisien regresi variabel kapasitas sumber daya manusia menunjukkan koefisien

yang positif sebesar 0,099 dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin tinggi kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki, maka keterandalan pelaporan keuangan daerah semakin meningkat. (3) Koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan koefisien yang negatif sebesar -0,043 dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin baik teknologi informasi yang digunakan di suatu daerah, maka keterandalan pelaporan keuangan daerah semakin menurun. (4) Koefisien regresi variabel pengawasan keuangan daerah menunjukkan koefisien yang positif sebesar 0,560 dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin baik sistem pengawasan keuangan daerah, maka keterandalan pelaporan keuangan daerah semakin meningkat.

Hasil perhitungan untuk nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan *adjusted-R²* sebesar 0,643. Hal ini berarti bahwa 64,3% variasi variabel keterandalan pelaporan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh variabel kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan sisanya yaitu 35,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan SPSS, dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $42,369 > 2,740$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti model regresi dinyatakan fit (*goodness of fit*). Berdasarkan hasil tersebut, juga dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan variabel kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah Kabupaten Boyolali.

Tabel 15. Hasil Uji t Hipotesis

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	Keterangan
Kapasitas sumber daya manusia	2,015	1,997	0,048	H ₁ diterima
Pemanfaatan teknologi informasi	-0,646	-1,997	0,520	H ₂ ditolak
Pengawasan Keuangan daerah	8,777	1,997	0,000	H ₃ diterima

Sumber: Data diolah 2017

Dari hasil tabel 15 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel kapasitas sumber daya manusia mempunyai nilai t_{hitung} (2,015) lebih besar daripada t_{tabel} (1,997) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,048 < 0,05$. Oleh karena itu, **H₁ diterima**, sehingga kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Dari hasil tabel 15 tersebut juga dapat diketahui hasil uji t untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi mempunyai nilai t_{hitung} (-0,646) lebih besar daripada t_{tabel} (-1,997) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,520 > 0,05$. Oleh karena itu, **H₂ ditolak**, sehingga pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Dari hasil tabel 15 tersebut juga dapat diketahui hasil uji t untuk variabel pengawasan keuangan daerah mempunyai nilai t_{hitung} (8,777) lebih besar daripada t_{tabel} (1,997) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, **H₃ diterima**, sehingga pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

3.3 Pembahasan

a. Hasil Uji Hipotesis 1 (Kapasitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama mendapatkan hasil bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia mempunyai nilai t_{hitung} (2,015) lebih besar daripada t_{tabel} (1,997) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,048 < 0,05$. Oleh karena itu, **H₁ diterima**, sehingga kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan dengan adanya kapasitas sumber daya manusia maka peranan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi akan berjalan dengan baik. Tugas yang dibebankan kepada sumber daya tersebut dapat dilaksanakan dan diselesaikan secara profesional, efektif dan efisien. Jika kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka keterandalan pelaporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Priyamana, dkk (2014) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Hasil penelitian lain yang juga mendukung dengan hasil penelitian ini adalah penelitian Putra (2014) yang menjelaskan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pada SKPD Kabupaten Giamyar.

b. Hasil Uji Hipotesis 2 (Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah).

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi mempunyai nilai t_{hitung} (-0,646) lebih besar daripada t_{tabel} (-1,997) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,520 > 0,05$. Oleh karena itu, **H₂ ditolak**, sehingga pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa, pemanfaatan teknologi yang baru diterapkan di daerah tersebut tidak diimbangi dengan pelatihan khusus, serta pendampingan dari bagian ahli mengenai penggunaan teknologi yang ada, sehingga sumber daya yang menggunakan teknologi informasi tersebut untuk menyusun laporan keuangan daerah merasa kurang cocok karena, harus belajar sambil menyelesaikan tanggungjawab mereka.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusuma, dkk (2014) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian lainnya yang juga mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian Arfianti (2011) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

c. Hasil Uji Hipotesis 3 (Pengawasan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil bahwa variabel pengawasan keuangan daerah mempunyai nilai t_{hitung} (8,777) lebih besar daripada t_{tabel} (1,997) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, **H₃ diterima**, sehingga pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

Hasil ini dapat dijelaskan bahwa pengawasan terhadap penyusunan dan pelaporan keuangan daerah, secara tidak langsung dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal, dikarenakan laporan keuangan akan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, selain itu dalam penerbitan laporan keuangan kepada publik, akan tepat waktu serta menyajikan informasi yang akurat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian Priyama (2014) yang menyatakan bahwa, pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah. Hasil penelitian lainnya yang juga mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian Arfianti (2011) yang menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, hasil ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} (2,015) lebih besar daripada t_{tabel} (1,997) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,048 < 0,05$. Oleh karena itu, **H₁ diterima**.
- b. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, hasil ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} (-0,646) lebih besar daripada t_{tabel} (-1,997) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,520 > 0,05$. Oleh karena itu, **H₂ ditolak**.
- c. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah, hasil ini dibuktikan dengan nilai t_{hitung} (8,777) lebih besar daripada t_{tabel} (1,997) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, **H₃ diterima**.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama diharapkan menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan daerah.
- b. Untuk penelitian berikutnya diharapkan menggunakan sampel penelitian yang lebih banyak, sehingga hasilnya akan lebih tergeneralisasi.
- c. Untuk penelitian berikutnya, dalam pengumpulan data, diharapkan tidak hanya menggunakan kuesioner saja, namun dengan melakukan wawancara atau survei langsung, supaya mengurangi adanya bias data.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Nilai informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Dipnegoro.
- Darmayan dkk. 2014. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Laporan Keuangan Pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng*. Jurnal Akuntansi Program Akuntansi S1. Vol:2 No.:1 Tahun 2014.
- Kusuma dkk. 2014. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi , Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya)*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bung Hatta Padang. 2014.
- Mahaputra, Putra, Iwayan. 2014. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol:8 No:2 Tahun 2014.
- Pratiwi, Adiputra dan Atmaja. 2015. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan)*. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 3 No. 1 Tahun 2015.
- Primayana, Atmadja, Anantawikrama dan Darmawan, Nyoman. 2014. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan pemerintah Daerah. (Studi Empiris Pada Pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo)*. Jurnal Akuntansi Progam S1. Vol:2 No:1 Tahun 2014.
- Yosefrinaldi. 2013. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualiatas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Se-Sumatera Barat)*. Skripsi Universitas Negeri Padang.
- Zuliarti. 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah: (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus)*. Skripsi Universitas Mutiara Kudus.